

**PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Pada Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)**

Skripsi

Oleh:

**DIKI SATRIA
NPM 1411021032**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF VILLAGE FUNDS ON INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND COMMUNITY EMPOWERMENT (Study On: Desa Negara Ratu, Natar Subdistrict, South Lampung Regency)

By

DIKI SATRIA

Based on the village information system (SID) in 2021 the Village government targets Desa Negara Ratu to be an independent village. However, in fact in 2021 the status of Desa Negara Ratu became a developing village. This research aims to find out the Village Fund in infrastructure development and community empowerment.

This research was conducted in Desa Negara Ratu, Natar Subdistrict, South Lampung using secondary data with qualitative descriptive method.

The results of the study indicate that village funds have an effect on increasing infrastructure development in the form of adding village roads, reservoir, villages, gates, mosques, sanitation and drainage and road signs. Desa Negara Ratu has also succeeded in improving the library quality of the puskesmas and posyandu. Furthermore, village funds also have an effect on increasing community empowerment in the form of improving the quality of village development planning, increasing the quantity of system based treasury village profiles and village development as well as 36 PKK programs. Later, Desa Negara Ratu also succeeded in improving the quality of the capacity of the village head of the village apparatus and increasing the quantity of youth and women's groups as well as increasing self-sufficiency management. Furthermore, Desa Negara Ratu has also succeeded in increasing the level of posyandu, adding socialization of village latrines and improving the management of early PAUD/TK activities, village competitions and the management of BUMDes.

Keywords: *Village Fund, Infrastructure Development, Community Empowerment*

ABSTRAK

PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada: Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung selatan)

Oleh

DIKI SATRIA

Berdasarkan sistem informasi desa (SID) pada tahun 2021 pemerintah Desa menargetkan Desa Negara Ratu menjadi Desa mandiri. Namun, faktanya pada tahun 2021 status Desa Negara Ratu menjadi Desa berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan menggunakan data sekunder dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Desa berpengaruh meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa menambah jalan desa, embung desa, gapura masjid, sanitasi dan drainase serta rambu jalan. Desa Negara Ratu juga telah berhasil meningkatkan kualitas perpustakaan, PAUD, puskesmas dan posyandu. Selanjutnya, Dana Desa juga berpengaruh meningkatkan pemberdayaan masyarakat berupa peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa, menambah kuantitas penyusunan profil Desa, kebhendaraan berbasis sistem, dan pembentukan website desa serta 36 Program PKK. Kemudian Desa Negara Ratu juga berhasil meningkatkan kualitas kapasitas kepala desa, aparatur desa, dan menambah kuantitas kelompok pemuda dan perempuan, serta peningkatan pengelolaan swasembada. Selanjutnya, Desa Negara Ratu juga berhasil dalam meningkatkan kader posyandu, menambah sosialisasi jamban desa dan meningkatkan pengelolaan PAUD/TK, kegiatan lomba desa, serta pengelolaan BUMDes.

Kata Kunci :Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat

**PENGARUH DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Pada Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)**

Oleh

DIKI SATRIA

Skripsi

**Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI**

Pada

**Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021**

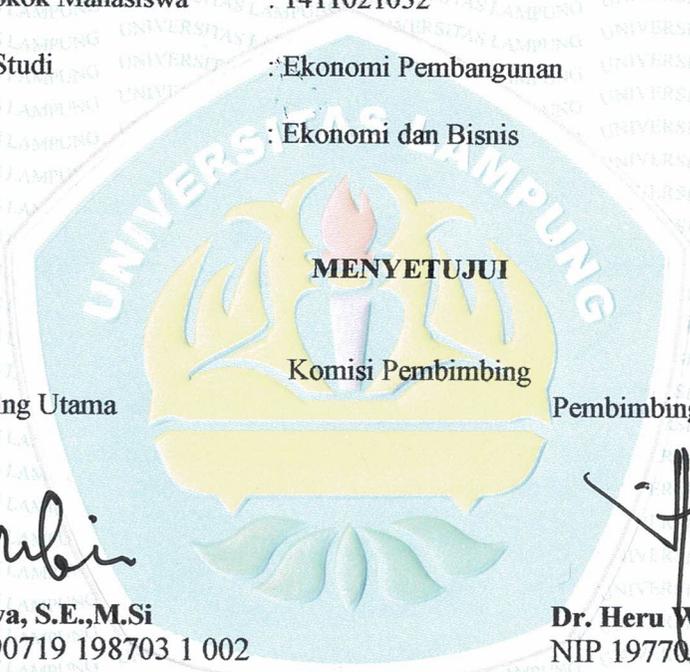
Judul Skripsi : PENGARUH DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI
PADA: DESA NEGARA RATU, KECAMATAN
NATAR, KABUPATEN LAMPUNG SELATAN)

Nama Mahasiswa : **Diki Satria**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1411021032

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Ambya

Heru Wahyudi

Dr. Ambya, S.E., M.Si
NIP 19590719 198703 1 002

Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si
NIP 19770212 200604 1 001

MENGETAHUI

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Neli Aida

Dr. Neli Aida, S.E., M.Si
NIP 19631215 198903 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

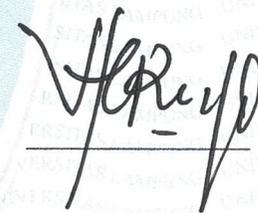
Ketua : Dr. Ambya, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Nairobi, S.E., M.Si.



Penguji II : Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. Nairobi S.E., M.Si.
19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 Juli 2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulisdengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Juli 2021


58B7EAJX294928294

Satria

Diki Satria

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Diki Satria yang dilahirkan di Cipadang pada tanggal 02 Juli 1996, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ngadiman dan Ibu Samirah.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2002 Pendidikan Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan pada tahun 2008 di SD Negeri 1 Padang Ratu. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Waylima, yang diselesaikan pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Gadingrejo, yang diselesaikan pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan melalui jalur SNMPTN. Selama perkuliahan penulis mengikuti berbagai kegiatan penulis mengikuti Kuliah Kunjung Lapangan (KKL) di berbagai instansi pemerintah.

Penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kedaung, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu selama 40 hari pada periode Januari tahun 2018. Penulis juga aktif berorganisasi di internal kampus yaitu lembaga kemahasiswaan Mahasiswa Ekonomi Pecinta Lingkungan(MAHEPEL Unila) dan lembaga eksternal kampus yaitu Vertical Rescue Indonesia.

MOTTO

“Be thankful for the bad things in life. They open your eyes to see the good things you weren't paying attention before”

(Film Zombieland)

“ Lebih baik dipersiapkan tapi tidak dipakai, dari pada dipakai tapi tidak siap”

(T. Sembiring Meliala)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karya sederhana ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ngadiman dan Ibu Samirah, yang telah mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mengajarkanku menjadi pribadi yang bermanfaat, mengajarkan membedakan yang baik atau buruk, selalu sabar akan segala tindakanku, memberikan saran dan dukungan terbaik untuk masa depanku, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kedua kakakku Siti Hajar, S.Pd. dan juga Orina, S.Pd yang juga telah mendukungku selalu.

Seluruh keluargaku dan sahabat-sahabatku.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “pengaruh dana desa terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari peranan dan bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung sekaligus sebagai dosen penguji I, yang telah memberikan saran dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Dr. Neli Aida, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus sebagai dosen pembahas yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Ambya, S.E., M.Si. selaku pembimbing skripsi I yang telah memberikan ilmu, waktu, arahan dan nasehatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heru Wahyudi, S.E., M.Si. selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan ilmu, waktu, arahan dan nasehatnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Moneyzar Usman, S.E.,M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan saran dan nasehat yang bermanfaat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan hingga selesai.
7. Staf FEB, Ibu Yati dan Ibu Mimi, terimakasih telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Pemerintah Desa Negara Ratu; Kak Muhibbat, Faiz. Terimakasih banyak dalam dukungan dan sarannya. Semoga sukses untuk kita semua.
9. Keluarga besar EP Brother 14; Akhmad Gusroni,S.E., Fitra Ramadhan,S.E., Aria Kurniawan, S.E. yang selalu bersama berbagi suka dan duka, semoga kita semua sukses bersama.
10. Keluarga besar Mahepel Unila; Ifan Rinaldy,S.E., Muhammad Rizqiandri,S.E., Rio Syaifudin,S.M., Yoko Aditia, A.Md., Fazri Fernanda, Padang Latief R., Ardika Maulana,A.Md.Akt., Kelvin Pranata, A.Md dan semuanya yang terlibat. Terimakasih karena selalu *support*. Terimakasih untuk kalian atas kisah lucu, cerita menarik disetiap pertemuan, dan bantuannya saat menjalani perkuliahan. Semoga dimasa depan silaturahmi tidak terputus dan kita semua dapat sukses.
11. Keluarga besar Vertical Rescue; Om Ikun, Om Narno, Abah Ooc, Bunda Mila, Tante Rika, Dita, Robi, Vilda dan lain-lain. Terimakasih banyak dalam dukungan dan sarannya. Semoga sukses untuk kita semua.
12. Semua pihak yang telah membantu demi terselesaikannya skripsi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 2 Juli 2021

Penulis

Diki Satria

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Pembangunan	10
2. Dana Desa	14
3. Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa	17
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20
5. Analisis Kinerja Desa	22
B. Tinjauan Empiris	25
C. Kerangka Pemikiran	27
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sumber Data	28
B. Definisi Operasional Variabel	28
C. Metode Pengolahan dan Analisis Data	30
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	37
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	44
D. Implikasi Penelitian	61
V. SIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	69
Tabel 1-7	70

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1 Dana Desa Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2019	3
2 Indeks Desa Membangun Tahun 2020.....	5
3 Pagu Dana Desa di Desa NegaraRatu Tahun 2015-2020	6
4 Status Desa Negara Ratu	6
5 Tinjauan Empiris.....	25
6 Variabel Penelitian	28
7 Analisis DD Desa Negara Ratu Tahun 2015-2020	32
8 Distribusi Alokasi DD Tahun 2015-2020	33
9 Persentase Alokasi DD Tahun 2015-2020	34
10 Pembangunan Infrastruktur.....	34
11 Pemberdayaan Masyarakat	35
12 Jumlah Penduduk Desa Negararatu	38
13 Analisis DD Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.....	41
14 Persentase Alokasi DD Tahun 2015-2020	41
15 Bidang Pembangunan Infrastruktur Tahun 2017	42
16 Bidang Pembangunan Infrastruktur Tahun 2019	43
17 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2016.....	43
18 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2017.....	44
19 Distribusi Alokasi DD Tahun 2015-2020	45
20 Persentase Alokasi DD Tahun 2015-2020	47
21 Pembangunan Infrastruktur.....	48
22 Pemberdayaan Masyarakat	53
23 Capaian Keluaran Output pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.....	58
24 Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015-2020	60
25 Perubahan Skor Dan Status IDM Desa Tahun 2015-2020	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Perkembangan Alokasi Anggaran Dana Desa Tahun 2015-2019.....	3
2. Nilai Indeks Pembangunan Desa 2019	5
3. Kerangka Pemikiran.....	26
4. Peta Kecamatan Natar.....	37
5. Peta Desa Negara Ratu.....	38
6. Perkembangan Dana Desa Tahun 2015-2020.....	39
7. SDGs Desa Negara Ratu Bidang Pembangunan Infrastruktur.....	53
5. SDGs Desa Negara Ratu Bidang Pemberdayaan Masyarakat	57

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yaitu proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. (Todaro & Smith, 2011). Keberhasilan suatu pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan bisa dinilai dari perubahan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Pengentasan kemiskinan merupakan agenda penting bagi suatu negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga pengentasan kemiskinan menjadi isu global dan utama dalam pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui agenda SDGs semua negara berkomitmen untuk melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan dan salah satunya adalah pengentasan kemiskinan (United Nations, 2015).

Seiring berjalannya waktu, pembangunan desa menjadi salah satu fokus utama dalam program pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang mulai berkembang dari waktu ke waktu. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

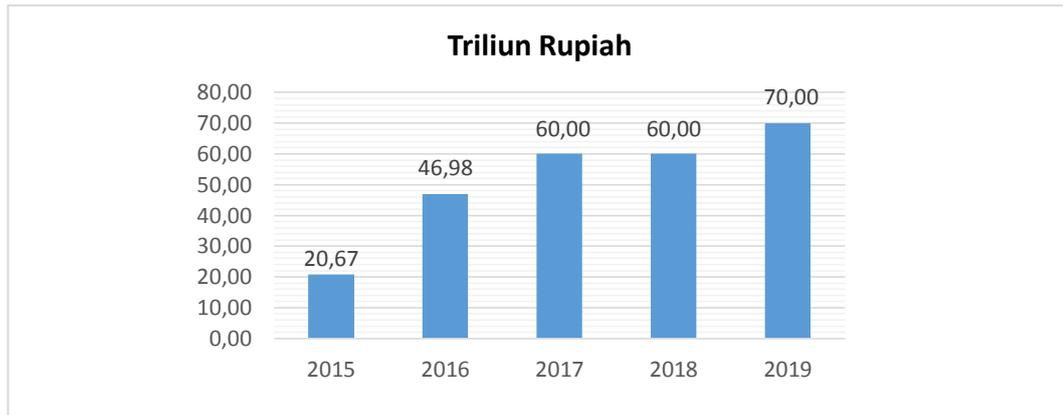
Pembangunan pedesaan terdiri dari pembangunan fisik dan *non* fisik. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata, pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Sedangkan

pembangunan non fisik adalah jenis pembangunan yang tercipta oleh dorongan masyarakat setempat dan memiliki jangka waktu yang lama. Contoh dari pembangunan non fisik adalah berupa peningkatan perekonomian rakyat desa dan peningkatan kesehatan masyarakat (Wresniwiro, 2007:208).

Secara umum, diperlukan program untuk meningkatkan pembangunan di desa, menurut Chen (2004) membuktikan pertumbuhan ekonomi di Cina di dukung oleh reformasi fiskal yang disertai reformasi pedesaan. Disamping itu reformasi fiskal saja tidak cukup dalam meningkatkan pertumbuhan, diperlukan perencanaan institusi berkaitan dengan pasar dan kualitas modal manusia. Reformasi fiskal memang secara nyata memberikan dampak mengejar ketertinggalan bagi desa-desa yang tertinggal. Kondisi ini harus melalui pemanfaatan kualitas sumber daya manusia dan pembiayaan pedesaan dalam pembangunan desa.

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana Desa (DD) sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi dorongan bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri (Hamzah Ardi, 2015).

Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kebijakan Dana Desa menjadi salah satu program unggulan Pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa. Hal tersebut dapat dilihat dari keseriusan Pemerintah dalam mengalokasikan anggaran Dana Desa dalam APBN Tahun Anggaran 2015. Realisasi Dana Desa tahun 2015 sampai dengan 2019 pada Gambar 1.



Gambar 1. Perkembangan Alokasi Anggaran Dana Desa Tahun 2015 -2019
 Sumber : Kementerian Keuangan RI, diolah 2021

Provinsi Lampung turut serta dalam menjalankan program DD, berikut adalah realisasi Dana Desa di Kabupaten Provinsi Lampung.

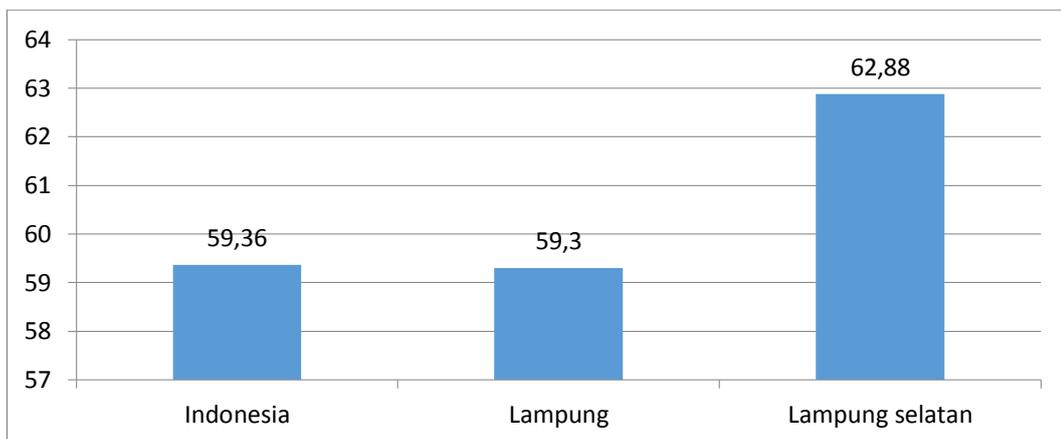
Tabel 1 Dana Desa Kabupaten di Provinsi Lampung Tahun 2019

No	Kabupaten	Dana Desa (Milyar)
1	Lampung Barat	127,18
2	Lampung Selatan	261,32
3	Lampung Tengah	309,09
4	Lampung Utara	248,16
5	Lampung Timur	273,70
6	Tanggamus	293,68
7	Tulang Bawang	132,91
8	Way Kanan	183,88
9	Pesawaran	155,64
10	Pringsewu	129,56
11	Mesuji	101,76
12	Tulang Bawang Barat	89,16
13	Pesisir Barat	121,00
	Jumlah	2.427

Sumber: DJPK Kemenkeu, diolah 2021

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan desa dan pembangunan yang sesuai untuk desa, maka dibutuhkan dua pendekatan yaitu melalui indeks pembangunan desa (IPD) dan indeks desa membangun (IDM). IPD merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia dengan unit analisisnya “Desa”.

Output dari penyusunan IPD adalah terpetakannya desa- desa berdasarkan tingkat perkembangan desa. Tiga klasifikasi Desa menurut IPD yaitu: desa mandiri, desa berkembang, dan desa tertinggal. Desa mandiri adalah desa yang telah terpenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) desa mencakup beberapa aspek yaitu: kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintah desa, serta kelembagaan desa yang berkelanjutan dengan nilai IPD lebih dari 75. Desa berkembang adalah desa yang sudah terpenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) desa pada semua aspek tetapi pengelolaannya belum menunjukkan keberlanjutan dengan nilai IPD lebih dari 50 namun kurang dari atau sama dengan 75. Dan Desa Tertinggal adalah desa yang belum terpenuhi Standart Pelayanan Minimal (SPM) desa pada aspek kebutuhan sosial dasar, infrastruktur dasar, sarana dasar, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan nilai IPD kurang dari atau sama dengan 50. Pada tahun 2019, sebagian besar desa di provinsi lampung adalah desa berkembang.



Gambar 2 : Nilai Indeks Pembangunan Desa 2019, diolah 2021

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2021

Hasil rata-rata nilai IPD di Indonesia sebesar 59,36 tergolong dalam klasifikasi desa berkembang. IPD Provinsi Lampung sebesar 59,30 dan 62,88 untuk Kabupaten Lampung Selatan sehingga masuk kategori Desa berkembang. Kabupaten Lampung Selatan dengan adanya Dana Desa yang diharapkan mampu menjadi stimulan bagi peningkatan IPD namun, sampai tahun 2019 masih dalam kategori Desa berkembang.

Indeks Desa Membangun, atau disebut IDM, dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa dan kawasan perdesaan. Indeks desa membangun mengklasifikan desa kedalam 5 klasifikasi yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Klasifikasi status desa berdasarkan IDM ini diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan kemajuan desa menuju desa mandiri. Berikut adalah Nilai IDM tahun 2020.

Tabel 2 Indeks Desa Membangun Tahun 2020

No	Pembangunan Desa	Nilai Indeks	Status Desa
1	Nasional	0,566	Tertinggal
2	Lampung	0,665	Berkembang
3	Lampung Selatan	0,685	Berkembang
4	Desa Negararatu	0,709	Maju

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020, diolah 2021

Berdasarkan tabel 2, secara nasional rata-rata IDM masuk dalam klasifikasi desa tertinggal dengan rentang nilai 0,566. Pada tabel tersebut dapat juga dilihat bahwa pembangunan desa untuk Provinsi Lampung telah menunjukkan perkembangan dan pembangunan desa dengan status desa berkembang dengan nilai 0,665. Sementara dalam Kabupaten Lampung Selatan rata-rata nilai indeks 0,685 yaitu masuk dalam kategori desa berkembang, untuk Desa Negara Ratu yang berada pada Kabupaten Lampung Selatan nilai indeksnya 0,709 yang masuk dalam kategori desamaju.

Desa Negara Ratu, merupakan salah satu Desa yang berada pada kawasan administratif Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 13.876 jiwa. Di Desa Negara Ratu diharapkan terbantu dengan adanya DD dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakatnya. Berikut adalah besaran DD yang dikelola Desa Negara Ratu dari tahun 2015-2020.

Tabel 3 Pagu Dana Desa di Desa NegaraRatu Tahun 2015-2020

Tahun	Dana Desa (Rp)
2015	325.203.142
2016	735.283.650
2017	964.409.573
2018	1.046.587.467
2019	1.280.530.163
2020	1.363.791.000

Sumber: Laporan Realisasi DD Desa Negara Ratu, diolah 2021

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dana desa yang di terima pemerintah desa setiap tahunnya meningkat, namun pada kenyataanya tidak berdampak pada peningkatan status Desa Negara Ratu. Nilai IDM tahun 2021 tersebut bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Status Desa Negara Ratu

Tahun	Status Desa	Skor IDM
2020	Maju	0,7098
2021	Berkembang	0,7006

Sumber: Data Sekunder, diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas dengan meningkatnya Dana Desa tidak sejalan dengan perbaikan status Desa maupun skor Desa itu sendiri. Padahal berdasarkan sistem informasi desa pada tahun 2021 pemerintah Desa menargetkan Desa Negara Ratu menjadi Desa mandiri. Namun, nyatanya pada tahun 2021 berdasarkan data diatas status Desa menjadi Desa berkembang.

Para peneliti terdahulu menemukan bukti-bukti yang berbeda-beda terkait DD, Dini (2010) mengemukakan bahwa DD memiliki hubungan positif dengan pembangunan desa di kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat. Nurliana (2013) dalam Penelitiannya menunjukkan pada proses perencanaan pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa, Namun karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah terhadap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa

sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat sasaran.

Widagdo, Widodo, dan Ismail (2016) menyebutkan kinerja perangkat desa dianggap masih rendah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD Desa), oleh karena itu sebagai lembaga yang memiliki garis koordinasi secara struktural dengan pemerintah desa maka kemudian (Ferina, Burhanuddin, dan Lubis 2016) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan dapat mewakili masyarakat untuk melakukan pengawasan kepada perangkat desa agar dapat mengelola Dana Desa secara efisien, ekonomis, efektif serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Desa tidak hanya sekedar jadi obyek pembangunan tetapi sekarang menjadi subyek untuk membangun kesejahteraan (Mondong 2013).

Lubherty, Sudati, Gentur (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa di Desa Greges, Kabupaten Temanggung sudah berjalan secara efektif namun rendahnya kualitas SDM dari aparatur pemerintah serta masyarakat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Dana Desa sehingga Dana Desa menjadi kurang optimal. P. Antou (2019) Menunjukkan efektivitas dana desa Talawaan terhadap pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat desa talawaan berada dalam kategori sangat efektif, dengan memperhatikan penguatan peran dan kelembagaan pemerintah. Pengelolaan anggaran desa pada berbagai bidang yang ada memerlukan manajerial dan akuntabel dalam menjaga agar dana yang ada dapat di salurkan sesuai dengan yang di rencanakan.

Berdasarkan bukti-bukti diatas, peran DD terjadi begitu luas dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat cenderung tidak mengalami percepatan perbaikan secara signifikan. Dengan adanya DD harusnya memberikan pengaruh yang positif dalam pembangunan ekonomi, terutama pada pemanfaatan pengalokasiannya dalam mewujudkan Desa mandiri. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Berdasarkan fenomena tersebut peneliti

tertarik melakukan penelitian yang berjudul pengaruh DD terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (studi pada:Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh DD terhadap pembangunan infrastruktur Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
2. Bagaimana pengaruh DD terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
3. Bagaimana capaian *output outcome* pembangunan Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Deskripsi pengaruh DD terhadap pembangunan infrastruktur Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
2. Deskripsi pengaruh DD terhadap pemberdayaan masyarakatDesa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan.
3. Deskripsi capaian *output outcome* pembangunan Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, diharapkan manfaat yang di dapat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini juga memberikan informasi mengenai pengaruh DD terhadap Pembangunan infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan desa

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teoritis

1. Pembangunan

Pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada *Gross Domestic Product* atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu provinsi, kabupaten, atau kota (Kuncoro, 2004).

Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi menekankan pada peningkatan *income per capita* (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada kemampuan suatu negara untuk meningkatkan *output* yang dapat melebihi pertumbuhan penduduk. Definisi pembangunan tradisional sering dikaitkan dengan sebuah strategi mengubah struktur suatu negara atau sering kita kenal dengan industrialisasi. Kontribusi mulai digantikan dengan kontribusi industri. Definisi yang cenderung melihat segi kuantitatif pembangunan ini dipandang perlu menengok indikator-indikator sosial yang ada (Kuncoro, 2004).

Paradigma pembangunan modern memandang suatu pola yang berbeda dengan pembangunan ekonomi tradisional. Pertanyaan beranjak dari benarkah semua indikator ekonomi memberikan gambaran kemakmuran. Beberapa ekonom modern mulai mengedepankan *dethronement of GNP* (penurunan tahta pertumbuhan ekonomi), pengentasan garis kemiskinan, pengangguran, distribusi pendapatan yang semakin timpang, dan penurunan tingkat pengangguran yang ada. Teriakan para ekonom ini membawa perubahan dalam paradigma pembangunan menyoroiti bahwa pembangunan harus dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional (Kuncoro, 2003).

Selanjutnya, dari evolusi makna pembangunan tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran makna pembangunan. Menurut Kuncoro (2004), pada akhir dasawarsa 1960-an, banyak negara berkembang mulai menyadari bahwa “pertumbuhan ekonomi” (*economic growth*) tidak identik dengan “pembangunan ekonomi” (*economic development*).

Inilah yang menandai dimulainya masa pengkajian ulang tentang arti pembangunan. Myrdal (1968), misalnya mengartikan pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Ada pula yang menekankan pentingnya pertumbuhan dengan perubahan (*growth with change*), terutama perubahan nilai-nilai dan kelembagaan. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi tidak lagi memuja *GNP* sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan.

Dalam praktik pembangunan di banyak negara, setidaknya pada tahap awal pembangunan umumnya berfokus pada peningkatan produksi. Meskipun banyak varian pemikiran, pada dasarnya kata kunci dalam pembangunan adalah pembentukan modal. Oleh karena itu, strategi pembangunan yang dianggap paling sesuai adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan mengundang modal asing dan melakukan industrialisasi. Peranan sumber daya manusia (SDM) dalam strategi semacam ini hanyalah sebagai “instrumen” atau salah satu “faktor produksi” saja. Manusia ditempatkan sebagai posisi instrumen dan bukan merupakan subyek dari pembangunan. Titik berat pada nilai produksi dan produktivitas telah mereduksi manusia sebagai penghambat maksimisasi kepuasan maupun maksimisasi keuntungan.

Sejumlah *indicator* ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (*GNP* atau *PDB*), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua *indicator* lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau *PQLI*) dan Indeks Pembangunan Manusia (*HDI*). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Deddy T. Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut :

1. Pendapatan perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran *GNP* maupun PDB merupakan salah satu indikator makroekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus

dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di Negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di Negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. *Finansial capital* merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index (PQLI)* digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian b yi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung beasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur

kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indicator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indicator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai factor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge, attitude dan skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya

2. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana

desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa.

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prinsip-prinsip penggunaan dana desa yaitu keadilan, kebutuhan prioritas, dan tipologi desa.

Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus).

a. Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
4. Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2015.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
6. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.

b. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa yaitu :

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan.

c. Pengalokasian Dana Desa

1. Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
4. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

d. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa

dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa.

3. Bidang Pembangunan Infrastruktur

a. Pengertian Pembangunan infrastruktur

Pembangunan merupakan proses yang mencakup perubahan atas berbagai struktur sosial yang ada didalam masyarakat. Siagian dalam Rohmah dan Ma'aruf (2016:3-4) mengemukakan bahwa: “pembangunan merupakan rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan”. Infrastruktur adalah suatu rangkaian yang terdiri atas beberapa bangunan fisik yang masing-masing saling mengkait dan saling ketergantungan satu sama lain. Ian Jacobs dalam Surya (2007:43) membagi infrastruktur menjadi 2 yaitu infrastruktur dasar dan pelengkap:

- i. Infrastruktur dasar (*basic* infrastruktur) meliputi sektor-sektor yang mempunyai karakteristik publik dan kepentingan mendasar untuk sektor perekonomian lainnya, tidak dapat diperjualbelikan (*nontradble*) dan tidak dapat dipisahkan baik secara teknis maupun sosial, contohnya Jalan, drainase, bendungan dan sebagainya.
- ii. Infrastruktur pelengkap (*complementary* infrastruktur) seperti gas, listrik, telepon, dan pengadaan air minum.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah sekaligus katalisator dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Oleh karenanya penting bagaimana sistem rekayasa dan manajemen infrastruktur dapat diarahkan untuk mendukung perkembangan ekonomi suatu kawasan wilayah.

Salah satu aspek penting dalam proses percepatan pembangunan adalah melalui pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dianggap penting karena infrastruktur memegang peranan penting sebagai roda penggerak dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan desa sangat erat kaitannya dengan pembangunan infrastruktur sebagai penopang kemajuan desa dan pertumbuhan desa. Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk peningkatan aksesibilitas guna menopang perkonomian desa serta pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Prinsip Pembangunan Desa

Dalam pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur desa selain harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, juga harus mampu menerapkan prinsip-prinsip pembangunan desa agar pembangunan yang dilakukan dapat dinikmati dan dimanfaatkan masyarakat desa dengan baik. Menurut Adisasmita (2010:19) sedikitnya ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam pembangunan desa yaitu:

i. Transparansi

Transparansi yaitu adanya keterbukaan dalam proses pembangunan. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yangdicapai.

ii. Partisipatif

Partisipasi menurut Tilaar (2009:287) adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

iii. Dapat dinikmati masyarakat

Dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan harus mampu menyelesaikan masalah publik. Sehingga, harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan

dapat memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Indikator yang digunakan dalam melihat bahwa pembangunan yang berjalan dapat dinikmati masyarakat adalah melalui penilaian bahwa pembangunan yang ada harus sesuai dengan keinginan dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat sehingga mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

iv. Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

v. *Sustainable* (Berkelanjutan)

Menurut Effendy dalam Wibawa (1991:14), pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dari uraian prinsip-prinsip di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa diterapkan pada pemanfaatan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur, yaitu: pengelolaan Dana Desa tidak terpisahkan dari APBDesa, transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan.

Penggunaan Dana Desa berdasarkan peraturan menteri diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;

- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat,2009:60).

Menurut Suriadi, 2005 yakni aspek penting dalam suatu program pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun sendiri oleh masyarakat, menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendukung keterlibatan kaum miskin, perempuan, buta huruf dan kelompok terabaikan lainnya, dibangun dari sumberdaya lokal, sensitif terhadap nilai-nilai budaya setempat, memerhatikan dampak lingkungan, tidak menciptakan ketergantungan, berbagai pihak terkait terlibat,serta berkelanjutan.

Menurut Fahrudin, 2011 bahwa memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 (tiga) jurusan:

- a) *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b) *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah- langkah

nyata seperti penyediaan berbagai masukan (*input*) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.

c) *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subyek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Melindungi dalam hal ini dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Penggunaan DD dibidang Pemberdayaan Masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader Pemberdayaan Masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa;
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau

- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa.

5. Alokasi Kinerja Desa

Dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, peraturan menteri keuangan nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan menteri keuangan nomor 205/PMK.07/2019. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebuah Desa dalam pasal 12 ayat (1) sampai dengan (12) yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{AK Kab/ Kota} = \text{Jumlah Desa AK} \times \text{AK Desa}$$

Keterangan:

$$\text{AK Kab/kota} = \text{Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota}$$

$$\text{Jumlah Desa AK} = \text{Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kab/kota}$$

$$\text{AK Desa} = \text{Alokasi Kinerja untuk setiap desa}$$

- (2) Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dihitung dengan ketentuan:

a. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus)Desa, jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah desa;

b. Daerah kabupaten/kota dengan jumlah desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, jumlah penerima Alokasi Kinerja adalah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan

c. Daerah kabupaten /kota dengan jumlah desa lebih dari 401 (empat ratus satu) Desa, jumlah desa penerima Alokasi kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah desa.

- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan desa yang tidak menerima Alokasi Afiriasi.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Skor Kinerja} : \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor kinerja : Skor kinerja tiap Desa

Y1 : Peengelolaan Keuangan Desa

Y2 : Pengelolaan Dana Desa

Y3 : Capaian Keluaran (*Output*)

Y4 : Capaian Hasil (*Outcome*)

- (6) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (7) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
 - a. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55 (lima puluh lima persen); dan

- b. persentase pengadaan baran jdan jasa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen).
- (8) Capaian Keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
- a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - b. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).
- (9) Capaian Hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai dari:
- a. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - b. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 - c. status Desa indeks Desa membangunterakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).
- (10) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung menggunakan rumus:
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$
- Keterangan:
- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah desa nasional
- (11) Data APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

(12) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersumber dari aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN)*.

B. Tinjauan Empiris

Tabel 5 Tinjauan Empiris

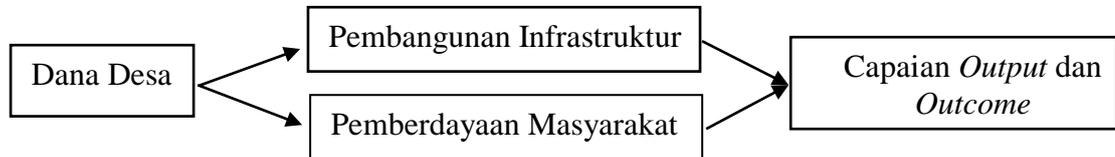
No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Dini (2010)	Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat	Hasil dari penelitian ini menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan desa di Kecamatan Stabat.
2	Nurliana (2013)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Pasar Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan fisik di desa Sukomulyo, pemerintah desa telah melibatkan masyarakat desa dalam penyusunan rencana kegiatan dan penentuan kebijakan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), namun karena keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah daerah terhadap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga pelaksanaan pembangunan fisik masih kurang dan membuat bangunan fisik kurang tepat sasaran

3	Hargono (2010)	Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali	Hasil yang diperoleh bahwa besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD Proporsional). Hasil perhitungan ini dianggap tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD. Pemanfaatan ADD tidak disalurkan pada bidang-bidang yang dapat menggerakkan ekonomi desa.
4	I wayan saputra (2016)	Efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa pada desa Lembean Kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009-2014	Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean, kecamatan Kintamani, kabupaten Bangli tahun 2009 sampai dengan 2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif).
5	Listiyani (2016)	Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan dana desa tahun anggaran 2015 cukup efektif

Sumber: Data diolah 2021

C. Kerangka Pemikiran

Secara sistematis, alur pikir penelitian ini adalah seperti gambar 4 berikut.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data Diolah, 2021

Gambar 3 diatas merupakan alur pikir penelitian untuk melihat bagaimana pengaruh DD terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta melihat capaian *output* dan *outcome* Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Lampung Selatan baik perubahan kualitas dan kuantitas serta prosesnya dilapangan.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data yang digunakan yaitu data DD, Pembangunan Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat tahun 2015 - 2020 di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dirangkum pada tabel 6.

Tabel 6 Variabel Penelitian

Variabel	Periode	Satuan	Sumber Data
Dana desa	Tahun	Jutaan rupiah	Kemendes PDTT
Pembangunan infrastruktur	Tahun	Jutaan rupiah	Kemendes PDTT
Pemberdayaan masyarakat	Tahun	Jutaan rupiah	Kemendes PDTT
Capaian output	Tahun	Nominal	Kemendes PDTT
Capaian outcome	Tahun	Persen	Kemendes PDTT

Sumber: Data diolah 2021

B. Definisi Operasional Variabel

Variabel terikat dari variabel ini adalah Pembangunan Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah DD. Batasan variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat (UU No.6 Tahun 2014). Data Dana Desa diperoleh dari Kemendes PDTT berupa data tahunan dalam satuan jutaan rupiah.

2. Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur desa merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk peningkatan aksesibilitas guna menopang perkonomian desa serta pemenuhan kebutuhan dasar (Siagian,2016). Data pembangunan infrastruktur diperoleh dari Kemendes PDTT berupa data tahunan dalam satuan jutaan rupiah.

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat,2009:60). Data pemberdayaan masyarakat diperoleh dari Kemendes PDTT berupa data tahunan dalam satuan jutaan rupiah.

4. Capaian Keluaran (*Output*)

Capaian keluaran *output* merupakan capaian keluaran dari DD bentuknya digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu 1) program untuk menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Data capaian keluaran (*output*) diperoleh dari Kemendes PDTT dan OM-SPAN diolah berupa data tahunan satuan nya nominal yang di deskripsikan.

5. Capaian Hasil (*Outcome*)

Capaian hasil merupakan capaian hasil DD yang dilihat dari perubahan jumlah penduduk miskin dan perubahan tingkat indeks desa membangun. Data capaian hasil (*outcome*) diperoleh dari Kemendes PDTT dan Perbup Lampung Selatan berupa data tahunan satuannya persen yang di deskripsikan.

C. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan data dan analisis data dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut.

1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Gambaran umum penelitian merupakan gambaran yang menjelaskan dimana letak geografis dan letak administratif wilayah penelitian dan disertai batas-batas wilayah daerah penelitian serta menggambarkan keadaan jumlah penduduk di Desa Negara Ratu.

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian merupakan gambaran yang menjelaskan variabel-variabel pada penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu dana desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat *output*, dan *outcome* pada periode tahun 2015-2020 di Desa Negara Ratu.

2.1 Statistik Deskriptif

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti DD, Pembangunan Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat. Data tersebut diperoleh dari Kementerian Desa PDTT untuk periode 2015 – 2020 di Desa Negara Ratu, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Dependen dalam penelitian ini adalah Pembangunan Infrastruktur, dan Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini DD. Fungsi dari statistik deskriptif adalah memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari sebagai berikut.

a. Mean

Mean merupakan rata-rata dari sekumpulan data yang kita miliki. Formulasnya sangat sederhana dengan menjumlah nilai dari seluruh data yang dimiliki dan membaginya dengan jumlah data tersebut. Pengujian statistik mean pada

penelitian ini untuk mengetahui rata rata jumlah DD, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada periode 2015-2020.

b. Median

Median adalah nilai tengah dari sebuah data. Apabila kita memiliki sekumpulan data, kita bisa mengurutkan data tersebut dari nilai terkecil hingga terbesar. jika kita memiliki jumlah data ganjil, maka nilai tengah data tersebut akan langsung menjadi median.

c. Maximum

Maximum adalah nilai terbesar dari sekumpulan data yang kita miliki. Pengujian statistik maximum pada penelitian ini untuk mengetahui nilai maximum pada variabel DD, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada periode 2015-2020.

a. Minimum

Minimum adalah nilai terkecil dari sekumpulan data yang kita miliki. Pengujian statistik minimum pada penelitian ini untuk mengetahui nilai minimum pada variabel DD, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada periode 2015-2020.

b. Standar Deviasi

Standar Deviasi merupakan ukuran nilai dari sebaran data terhadap rata-ratanya. bila anda menggunakan varians, maka nilai yang anda dapatkan sangatlah besar. nilai ini tidak mampu menggambarkan bagaimana sebaran data yang sebenarnya terhadap rata-rata. untuk mendapatkan nilai yang lebih mudah diinterpretasikan, standar deviasi adalah ukuran yang lebih tepat. standar deviasi menghasilkan nilai yang lebih kecil dan mampu menjelaskan bagaimana sebaran data terhadap rata-rata.

c. Persentase Pertumbuhan Tahunan

Analisis pertumbuhan ini digunakan untuk melihat pertumbuhan DD dalam kurun waktu 6 tahun terakhir pada periode 2015-2020 satuannya yaitu persen.

$$E_D = \frac{E_{D(n)} - E_{(n-1)}}{E_{D(n-1)}} \times 100\%$$

Diketahui : E_D = Persentase Pertumbuhan
 $E_{D(n)}$ = jumlah DD tahun sekarang
 $E_{(n-1)}$ = jumlah DD tahun sebelum

3. Pembahasan

Pembahasan penelitian merupakan pembahasan yang menjelaskan variabel-variabel pada penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu dana desa, pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat *output*, dan *outcome* pada periode tahun 2015-2020 di Desa Negara Ratu.

3.1 Analisis DD Tahun 2015-2020

Analisis DD menjelaskan jumlah DD dan penggunaannya serta di persentasekan secara global masing-masing bidang yaitu bidang penyelenggaraan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana yang bisa dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7 Analisis DD Desa Negara Ratu Tahun 2015-2020

No	Uraian	Jumlah											
		2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)	2018	(%)	2019	(%)	2020	(%)
1	Bidang												
	Penyelenggaraan												
	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan												
	Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan												
	Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan												
	Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Penanggulangan												
	Bencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data diolah 2021

Selanjutnya, untuk mengetahui nilai maksimum dan minimum peneliti membuat tabel bantu distribusi alokasi DD tahun 2015-2020 guna mempermudah pembaca

dalam mengetahui dan memahami nilai maksimum dan minimum tiap bidang yang bisa dilihat pada tabel 8 dibawah ini.

3.1.1 Distribusi Alokasi DD Tahun 2015-2020

Distribusi Alokasi DD ini dicari hasil maksimum dan minimumnya tiap bidang yaitu bidang penyelenggaraan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan Desa serta penanggulangan bencana. Tabel ini diharapkan mampu menjelaskan persebaran alokasi DD maximum dan minimum dari tahun 2015-2020 yang ada di Desa Negara Ratu. Berikut adalah tabel 8 distribusi alokasi DD Tahun 2015-2020.

Tabel 8 Distribusi Alokasi DD Tahun 2015-2020

No	Uraian	Tahun 2015-2020	
		Minimum	Maximum
1	Bidang Penyelenggaraan Desa	-	-
2	Pembangunan Desa	-	-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	-	-
5	Penanggulangan Bencana	-	-

Sumber : Data diolah 2021

Kemudian setelah mengetahui nilai maximum dan minimum masing-masing bidang pengguna DD dari tahun 2015-2020 peneliti ingin mengetahui persentase alokasi DD tahun 2015-2020.

3.1.2 Persentase Alokasi DD Tahun 2015-2020

Persentase Alokasi DD merupakan persentase untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana nilai masing-masing bidang setiap tahunnya. Dengan ini mampu mengetahui skala prioritas dan tingkat persentase masing-masing bidang yaitu bidang penyelenggaraan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat,serta penanggulangan bencana yang ada di Desa Negara Ratu pada periode tahun 2015-2020. Berikut ini adalah tabel 9 persentase alokasi DD tahun periode 2015-2020.

Tabel 9 Persentase Alokasi DD Tahun 2015-2020

No	Uraian	Jumlah					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		%	%	%	%	%	%
1	Bidang Penyelenggaraan Desa	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan Desa	-	-	-	-	-	-
3	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-	-	-	-	-
4	Pemberdayaan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
5	Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data sekunder diolah 2021

3. Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur

Setelah mendistribusikan dan menentukan persentase alokasi DD pada tiap bidang maka, pada tahapan selanjutnya peneliti memisah untuk mengetahui secara mendetail bagaimana DD mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat baik proses, perubahan peningkatan kuantitas dan kualitasnya.

Tabel dibawah ini menjelaskan bagaimana DD berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur pada periode tahun 2015-2020 di Desa Negara Ratu sebagai berikut.

Tabel 10 Pembangunan Infrastruktur

No	Uraian	Satuan	Tahun						Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jalan Desa	Km	-	-	-	-	-	-	-
2	Embung Desa	Unit	-	-	-	-	-	-	-
3	Wc Desa	Unit	-	-	-	-	-	-	-
4	Drainase	Meter	-	-	-	-	-	-	-
5	Rambu Jalan	Unit	-	-	-	-	-	-	-
6	Gapura Masjid	Unit	-	-	-	-	-	-	-
7	Poster/Baliho	Unit	-	-	-	-	-	-	-
8	Renovasi Perpustakaan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Pengelolaan PAUD/TK	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Pengelolaan Puskesmas	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
11	Pengelolaan Posyandu	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Tabel 10 diatas menjelaskan bagaimana komponen-komponen pembangunan infrastruktur tersebut terbagi dalam masing-masing satuan yaitu berupa jalan desa dengan satuannya kilo meter, embung desa satuannya unit, wc desa satuannya unit, dan drainase satuannya meter. Desa Negara Ratu juga melakukan pembangunan berupa rambu jalan, gapura masjid dan poster baliho yang semuanya satuannya unit. Selanjutnya, melaksanakan renovasi perpustakaan, pengelolaan PAUD/TK, puskesmas dan posyandu yang semua satuannya kegiatan.

Kemudian untuk melihat pengaruh DD terhadap pemberdayaan masyarakat maka akan di bahas pada tabel 11 di bawah ini.

4. Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Tabel dibawah ini menjelaskan bagaimana DD berpengaruh terhadap pemberdayaan masyarakat pada periode tahun 2015-2020 di Desa Negara Ratu sebagai berikut.

Tabel 11 Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Tahun						Total
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Peningkatan Perencanaan Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
2	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
3	Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
4	Peningkatan Kualitas Kepala Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
5	Program PKK	Program	-	-	-	-	-	-	-
6	Penyusunan Profil Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
7	Pelatihan Bendahara Berbasis Sistem	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
8	Pembentukan Website Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
9	Pembentukan BUMDes	Unit	-	-	-	-	-	-	-
10	Sosialisasi Jamban Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
11	Pelatihan Guru PAUD/TK	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
12	Lomba Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
13	Peningkatan Kualitas Perangkat Desa	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
14	Peningkatan Pengembangan Swasembada	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-
15	Peningkatan kader Posyandu	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Tabel 11 diatas menjelaskan bagaimana komponen-komponen pemberdayaan masyarakat tersebut terbagi dalam masing-masing satuan yaitu berupa Peningkatan perencanaan desa, peningkatan kapasitas kelompok perempuan dan pemuda, peningkatan kualitas kepala desa, penyusunan profil desa, pelatihan bendahara berbasis sistem, pembentukan website desa, sosialisasi jamban desa, pelatihan guru PAUD/TK, lomba desa, peningkatan kualitas perangkat desa, peningkatan pengembangan swasembada, peningkatan kader posyandu yang semua satuannya yaitu kegiatan dan PKK dengan satuannya program serta pengelolaan keuangan BUMDes yang satuannya unit.

5. Capaian *Output* dan *Outcome* DD Tahun 2015-2020

Variabel capaian *output* merupakan capaian keluaran baik pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Negara Ratu yang digolongkan atas 1) menunjang aktivitas ekonomi masyarakat, 2) meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan, Capaian hasil (*outcome*) bisa dilihat dari perubahan indeks desa membangun (IDM), perubahan status desa IDM, serta perbaikan jumlah penduduk miskin desa.

6. Implikasi Penelitian

Implikasi penelitian merupakan keterkaitan variabel-variabel penelitian. Pada penelitian ini bagaimana dana desa berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat sudah tepat guna dan sesuai dengan program nawa cita pemerintah dan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang membangun perekonomian dan pemerataan dari wilayah pinggiran.

V.SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DD dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat (Studi Pada Desa Negararatu, Natar, Lampung Selatan). Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Desa berpengaruh meningkatkan pembangunan infrastruktur berupa menambah jalan desa sepanjang 8,1 km, 2 unit embung desa dan 1 unit gapura masjid, beserta 1 unit poster baliho dan 1 unit Wc Desa serta drainase sepanjang 456m. Desa negara ratu juga telah berhasil menambah 3 kegiatan renovasi perpustakaan, 2 kegiatan PAUD, 3 kegiatan puskesmas dan posyandu serta 2 unit rambu jalan. Dana desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat desa negara ratu, tersedianya dan terbangunnya akses jalan desa akan memberikan dampak meningkatkan keterjangkauan, aksesibilitas dan mobilitas masyarakat desa terhadap kegiatan baik sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
2. Dana Desa berpengaruh meningkatkan pemberdayaan masyarakat berupa 2 kegiatan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa berupa berhasilnya melakukan musrenbang desa yang menghasilkan sebuah rumusan prioritas pembangunan desa, menambah 2 kegiatan penyusunan profil desa, menambah 4 kualitas pelatihan kebidaharaan berbasis sistem, dan menambah 1 kegiatan pembentukan website Desa serta menambah 36 Program PKK dengan berlangsungnya 4 pokja yaitu berupa bina keluarga balita, gerakan pangan beragam bergizi dan seimbang, pembuatan tanaman obat keluarga dan gerakan wanita peduli reproduksi. Kemudian Desa Negara Ratu juga mengalokasikan untuk kepentingan 2 peningkatan kualitas

kapasitas kepala desa, 2 kegiatan peningkatan kualitas kapasitas aparatur desa, 2 kegiatan peningkatan kualitas kapasitas kelompok pemuda dan 1 kegiatan peningkatan kapasitas kelompok perempuan, 1 kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan swasembada, 1 kegiatan peningkatan kuantitas kader posyandu, 1 kegiatan sosialisasi jamban desa dan 2 kegiatan peningkatan pengelolaan PAUD/TK, 1 kegiatan lomba desa, menambah 3 unit pengelolaan dalam BUMDes. Pemberdayaan Sumber daya Manusia di Desa Negara Ratu merupakan bagian yang penting karena, tersedianya sumberdaya desa yang optimal akan mampu mengelola berbagai bidang di desa baik dalam bidang Sosial, Ekonomi, budaya dan Lingkungan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan baik kegiatan dan alokasinya dalam upaya mendorong pemerintah dalam akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi.
2. Pemerintah Desa perlu memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pengembangan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2010. *Pembangunan pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Afrianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Studi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). Skripsi Universitas Diponegoro Tahun 2011.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2013. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bintarto, R. 1983. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Chozin, Sumardjo dan Susetiawan, 2010. *Pembangunan Pedesaan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*. Bogor:IPB Press
- Dini, Gemala Sari. 2010. *Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
- Fahrudin, Adi. 2011. *Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Jakarta: Humaniora
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang : Edisi 7. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah Ardi, 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Desa yang Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Surabaya:Penerbit Pustaka.
- Hargono, Didiek Setiabudi. 2010. *Efektivitas Penyaluran Alikasi Dana Desa Pada Empat Desa di Kabupaten Karangasem Provinsi Bali*. Tesis. Universitas Indonesia Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad 2010, *Masalah, Kebijakan, dan Politik, Ekonomika. Pembangunan*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Listiyani, Rini, 2016. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang*. Jurnal, FIS UNY.

- Liliana, Meutia. 2017. *Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Malang*
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*. Bina Aksara.
- Nurliana. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Sukomulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara*. Ejournal Administrasi Negara.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pelaksanaan pembangunan desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2016 tentang prioritas dana desa.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi dana desa.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang perubahan ketiga pengelolaan dana desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang pengelolaan dana desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan.

- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Setiap Desa Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Republik Indonesia. 1979. Undang Undang Nomor 5 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. Undang Undang Nomor 6 tentang Desa, Jakarta
- RPJMDes Pemerintah Desa Cipadang Tahun 2019 tentang Jumlah Penduduk
- Rohmah, Kulia Tatik., & Ma'ruf, M. Farid. (2016). *Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban*. Kajian Otonomi Daerah. 1(1): 1-11
- Saputra, I Wayan. 2016. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli tahun 2009-2014*. Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE). Volume 6 Nomor 1, 2016.
- Siagian, Sondang, P. 2005. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta : P.T. Bumi Askara
- Sinaga, Murbanto. 2016. *Keuangan Daerah*. Medan: USU press.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa: Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta:Penerbit Buku Kompas.
- Suriadi, Agus. 2005. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat* (Diktat).Medan: Fisip USU.
- Suwignjo. 1986. *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Yogyakarta.
- Wibawa, Samodra. 1991. *Pembangunan Berkelanjutan, Konsep dan Kasus*.Cetakan pertama. Yogyakarta:Tiara Wacana.
- Wresniwiro. 2007, *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.